

ANALISIS *OUTPUT* BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MEKAR SUKAJADI CIANJUR)

Mochammad Ikbal Sonuari¹⁾ dan Fentiny Nugroho²⁾

Abstract

This study aims to analyze the output of BUMDes in increasing Beneficiary Families of Program Keluarga Harapan (PKH). This research was conducted at BUMDes Karya Mekar Sukajadi Village, Campaka District, Cianjur Regency. BUMDes Karya Mekar is one of the BUMDes that involves beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (KPM PKH) in the BUMDes business venture. Beneficiaries of the Program Keluarga Harapan or KPM PKH are categorized into Poor Household category.

This research was conducted using a qualitative approach and employing in-depth interview and observation techniques. This research study shows that through BUMDes, KPM is involved in order to provide them with an opportunity to run business for improving their economic conditions. It is a supporting element to assist the KPM to be economically self-reliant. The results of the study have shown that BUMDes provides output to the beneficiaries of the Program Keluarga Harapan. BUMDes provides the KPM with: 1) Access to business opportunities; 2) Increase in family income; 3) Easy access to capital goods; 4) Enhancing financial management knowledge; and 5) Accelerating the independent graduation of the Program Keluarga Harapan.

Keywords: economic improvement, BUMDes, Beneficiary Families, Program Keluarga Harapan (PKH).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui output atau luaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Karya Mekar Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. BUMDes Karya Mekar merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Penerima Manfaat pada Program Keluarga Harapan, yang dikenal dengan istilah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), merupakan kategori rumah tangga miskin.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam serta observasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa melalui BUMDes, KPM dilibatkan dalam rangka memberi peluang mereka berwirausaha untuk peningkatan ekonomi dan bentuk komplementaritas dalam mendukung KPM mandiri secara ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memberikan output atau luaran bagi para penerima manfaat Keluarga Harapan. BUMDes memberikan KPM: 1) Akses peluang usaha; 2) Peningkatan pendapatan keluarga; 3) Akses modal barang dengan mudah; 4) Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan; dan 5) Percepatan Graduasi Mandiri dari Program Keluarga Harapan.

Kata Kunci: peningkatan ekonomi, BUMDes, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH).

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Desa merupakan salah satu unsur penting di dalam pembangunan Nasional. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis

sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan pembangunan ekonomi maupun sosial. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat bahwa saat ini terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia dan 110 juta penduduk diantaranya tinggal di wilayah pedesaan (BPS, 2019). Informasi mengenai jumlah dan penduduk di Desa diperkuat

melalui data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa di tahun 2018, Indonesia memiliki sejumlah 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu diantaranya merupakan kategori desa tertinggal (Kemendes, PDTT, 2018).

Salah satu upaya dalam mengembangkan desa adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit mendorong kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan masyarakatnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur bentuk tata kelola pemerintahannya secara mandiri termasuk di dalam penggunaan dana bantuan yang langsung diberikan melalui dana desa yang mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Tumpuan dinamika kehidupan desa sangat tergantung dari partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa sehingga masyarakat desa mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai, sosial, budaya, ekonomi dan pengetahuannya secara mandiri.

Pembangunan penguatan ekonomi desa diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai kelembagaan ekonomi desa dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya lokal serta aset yang dimiliki desa. Selain amanat dari hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, pendirian BUMDes juga merupakan program kerja unggulan dalam Nawakerja Prioritas periode 2015-2019 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kemendes PDTT). Indonesia saat ini memiliki 60.911 BUMDes atau setara dengan 64,85 persen dari total desa yang ada di Indonesia (BPS, 2019). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki 5.625, dan 250 diantaranya BUMDes telah terbentuk di Kabupaten Cianjur (Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, 2019).

Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tertuang bahwa BUMDes tidak hanya sebagai lembaga ekonomi atau komersil, namun juga bisa menjadi lembaga yang mampu berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan di suatu desa. BUMDes mampu mendorong masyarakat untuk memulai sebuah usaha baru sesuai potensi masyarakat serta mampu meningkatkan taraf Pendidikan anak-anak dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Caya dan Rahayu, 2019). Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan

kewirausahaan bagi masyarakat desa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakatnya. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa dilakukan guna melakukan perubahan kondisi sosial ekonomi pedesaan (Ansari, 2013).

Kewirausahaan yang menjadi peluang untuk peningkatan ekonomi desa diwujudkan dalam bentuk hadirnya BUMDes. Masyarakat desa yang umumnya adalah bekerja dan bermata pencaharian di sektor pertanian, diharapkan bisa terus meningkatkan produktivitasnya agar secara mandiri bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Bahwa BUMDes memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan membuka lapangan pekerjaan. Hal demikian coba dilaksanakan oleh salah satu BUMDes yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Cianjur.

BUMDes Karya Mekar berlokasi di Wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Kabupaten Cianjur. BUMDes ini dibentuk tahun 2016, namun hanya sekedar pembentukan tanpa memiliki aktivitas kegiatan untuk pembangunan desa. Ketidaktifan kegiatan Bumdes coba diaktivasi kembali oleh beberapa tokoh penggiat masyarakat yang menuntut adanya kejelasan keberadaan dari BUMDes sehingga dibentuklah susunan kepengurusan BUMDes yang baru di tahun 2018. Pada tahun 2019, Desa Sukajadi mendapatkan kesempatan menerima bantuan permodalan bagi BUMDes. Kesempatan ini dijadikan peluang oleh pengurus BUMDes untuk mengembangkan kembali aktivitas yang dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Desa. BUMDes Karya Mekar menerima bantuan permodalan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui APBD sejumlah lima puluh juta rupiah sebagai pengembangan bantuan usaha modal BUMDes, selain Desa Karya Mekar terdapat 64 desa yang memperoleh bantuan yang sama yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2019 (Rinaldi, wawancara, 11 November 2019).

Pengembangan bantuan modal BUMDes diperuntukkan untuk Peningkatan ekonomi Keluarga dari Rumah Tangga Miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu, salah satunya bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau

dikenal dengan istilah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program keluarga Harapan merupakan bagian dari bantuan sosial. Midgley (2014, h. 181) menyatakan bahwa bantuan sosial atau *social assistance* merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang dibiayai atau didanai dari pendapatan pemerintah, beberapa LSM ataupun donor internasional. Sistem bantuan sosial PKH menggunakan konsep *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat memberikan uang kepada orang miskin dengan imbalan memenuhi kondisi perilaku tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang memungkinkan seluruh masyarakat bertanggung jawab atas kebutuhan dan keinginan anggotanya (Masunzu, 2014).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menekankan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH yang merupakan bagian dari Rumah Tangga Miskin berhak mendapatkan bantuan komplementer (bantuan pelengkap PKH), salah satunya melalui kegiatan peningkatan ekonomi. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa serta membuka lapangan kerja. Hal tersebutlah yang semata-mata mendorong upaya sinergis yang dilakukan oleh BUMDes Karya Mekar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya dengan melibatkan para KPM PKH di Desa Sukajadi. Desa Sukajadi memiliki jumlah KPM mencapai 306 (Data PPKH Cianjur, 2019), diantara jumlah tersebut terdapat KPM yang dilibatkan dalam bisnis usaha produk unggulan desa serta bisnis warung sembako dan bisnis produk unggulan olahan tahun.

Ada beberapa penelitian tentang BUMDes yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan dampak BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan perubahan ekonomi dan sosial (Anggraeni, 2016; Tama dan Yanuardi, 2013; Prasetyo, 2016). Penelitian lainnya juga menggambarkan peranan BUMDes berkaitan dengan proses pelibatan perempuan dalam BUMDes sebagai bentuk pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi keluarga berkaitan dengan budidaya pertanian (Anggraini dan Kurniawanto, 2019). BUMDes berperan dalam kegiatan *social enterprise* dalam berkembangnya perekonomian masyarakat (Khosyi, Nurrohman, dan Fahmi, 2018).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tampaknya belum ada yang secara khusus menggambarkan tentang pelibatan keluarga miskin penerima manfaat suatu program seperti KPM PKH dalam aktivitas kegiatan BUMDes. Menurut Zastrow (2010, h. 128-129) kemiskinan biasanya didasarkan pada kekurangan uang, dan pendapatan tahunan adalah ukuran yang paling umum diterapkan. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengingat pada umumnya, keluarga miskin penerima program PKH mengalami hambatan dan masalah dalam mengakses kesempatan kerja atau usaha, sehingga tujuan penelitian adalah untuk menganalisis *output* atau luaran yang dihasilkan dalam proses pelibatan KPM PKH dalam aktivitas BUMDes. Pelibatan aktivitas ekonomi KPM PKH selama ini terbatas karena kurangnya akses peluang dan modal, dengan demikian BUMDes bisa menjadi peluang ekonomi untuk meningkatkan sumber pendapatan KPM. Upaya BUMDes ini dapat mendorong upaya pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Keunikan BUMDes Karya Mekar yang melibatkan KPM PKH sebagai pelaksana bisnis usaha merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pathak, Jena, & Kalra (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus dalam memahami pertanyaan penelitian dengan pendekatan humanistik atau idealistik. Metode kualitatif berupaya memahami kepercayaan individu, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi mereka. Sedangkan Creswell (2014, h. 32) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi atau lukisan terhadap suatu permasalahan secara sistematis, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Neuman (2016: 44) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian dimana tujuan utamanya adalah untuk “melukis sebuah gambar” profil/persoalan, klasifikasi dari tipe-tipe, atau sebuah kerangka dari langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi; wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi. Studi literatur dan dokumentasi bisa

dipergunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data pendukung yang digunakan untuk memperkuat data utama. Bungin (2016) menjelaskan bahwa sebagian data yang bisa digunakan berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu lampau. Studi dokumentasi menurut Creswell (2014, h. 239) digunakan untuk memperoleh jenis data yang bersumber dokumen publik misalnya surat kabar, notulensi rapat, laporan resmi serta dokumen pribadi misalnya buku harian, surat dan email. Teknik wawancara secara mendalam (*indepth interview*) menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam melakukan wawancara agar tidak menyimpang dari topik yang sedang dibicarakan. Menurut Neuman (2013, h. 494) bahwa wawancara penelitian lapangan berlangsung dalam berbagai cara: tidak terstruktur, mendalam, etnografis, pertanyaan terbuka, informal dan lama. Observasi kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra pengamatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan lainnya. Creswell (2014, h. 239) menjelaskan observasi menghasilkan catatan lapangan tentang perilaku dan kegiatan individu di lokasi penelitian. Teknik observasi ini menjadi penting untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak diperoleh pada saat melakukan wawancara sehingga tidak terjadi keraguan dalam mempercayai data dan mengecek kepercayaan data yang ada di lapangan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif sebagai pengamat (*observer as participant*), disini memungkinkan peneliti untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti yang diinginkan, namun peran utama peneliti adalah untuk mengumpulkan data, dan kelompok yang diteliti menyadari kegiatan pengamatan peneliti. Penelitian ini berlokasi di BUMDes Karya Mekar, Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang berjumlah tigabelas informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola secara sinergitas oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Tujuan didirikannya BUMDes diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari; menjadikan salah satu peluang usaha atau lapangan pekerjaan; pengelolaan sumberdaya; serta dalam hal mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mendorong pemerintahan di Desa untuk mendirikan sebuah BUMDes dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Desa saat ini diberikan wewenang dan kekhususan untuk mengurus secara otonomi daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Ridlwan (2014) BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dalam kewirausahaan masyarakat, peran kelembagaan sangatlah penting (Alifa dan Nugroho, 2019).

Desa Sukajadi merupakan sebuah Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dengan pemimpin daerahnya yaitu kepala Desa Dadang, S.IP yang menjabat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Secara geografis Desa Sukajadi, memiliki luas wilayah sekitar 1.045 Hektar, dan berada diatas ketinggian ± 967 Meter diatas permukaan laut. Desa Sukajadi dikelilingi oleh pegunungan sehingga kondisi cuaca di daerah tersebut relatif sejuk dan dingin dengan suhu rata-rata mencapai 15-25° Celcius. Desa Sukajadi berada di jalur nasional wilayah selatan Kabupaten Cianjur, wilayah Desa Sukajadi memiliki jarak tempuh dari pusat kota mencapai ± 30 Kilometer, dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk dapat bisa mengakses wilayah desa Sukajadi. Secara demografis, jumlah penduduk Desa Sukajadi mencapai 7.094 jiwa berdasarkan data kependudukan Desa di Bulan Agustus tahun 2019.

Pembentukan BUMDes di Desa Sukajadi disahkan melalui Peraturan Desa Sukajadi Nomor 06 Tahun 2016. Susunan kepengurusan dalam BUMDes Karya Mekar ditentukan melalui musyawarah desa. Namun setelah terbentuknya kepengurusan BUMDes di tahun 2016, kegiatan dalam BUMDes tidak berjalan sehingga BUMDes tidak aktif. Seiring berjalannya waktu, melihat kondisi BUMDes yang mati suri, terbentuk namun tidak memiliki kegiatan, pihak Kepala Desa Sukajadi mengajak beberapa tokoh masyarakat melakukan musyawarah kembali untuk menentukan kepengurusan BUMDes Karya Mekar yang baru. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengurus BUMDes Karya Mekar:

“.....2016 di perdeskan dan di SK-kan kepengurusan BUMDes, susunan kepengurusan nya ada tapi gak aktif, yang di SK, jenis usahanya yaitu tipe menjalankan usaha perantara (*brokering*) yaitu pengelolaan pasar dan gas tetapi itu semua ga jalan, seiring waktu bumdes karyamekar masuk dalam ajuan bantuan permodalan dari pemerintah Kabupaten, desa mendesak pengurus yang lama yang telah di SK-kan untuk membuat pengajuan proposal dan lainnya, tetapi gak jalan, dari sana akhirnya Kepala Desa meminta untuk disusun ulang kepengurusan BUMDes, kami pengurus baru waktu itu diminta untuk mengikuti musyawarah dalam pemilihan kepengurusan BUMDes yang baru hingga terpilih seperti sekarang” (UJ, 9 Desember 2019).

Pada bulan Juni 2018, ditetapkanlah kepengurusan BUMDes Karya Mekar yang baru. Pada masa itu, kepengurusan yang baru belum sepenuhnya melakukan aktivitas kegiatan untuk menjalankan bisnis usaha, namun masih melalui fase uji coba dan fase pembelajaran mengenai pengembangan kegiatan dalam BUMDes. Pada awal tahun 2019, pihak Desa Sukajadi mendapatkan informasi terkait bantuan permodalan untuk Pengembangan BUMDes. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, yang merupakan dana hibah dari APBD Kabupaten. BUMDes Karya Mekar merupakan satu dari enampuluh empat BUMDES yang memperoleh bantuan tersebut, setiap BUMDes diberikan dana hibah sejumlah 50 juta rupiah untuk pengelolaan BUMDES, dengan syarat harus melibatkan Rumah Tangga Miskin dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Bantuan yang dialokasikan di tahun 2019, menjadi peluang untuk melakukan pengembangan BUMDes dan bentuk kontribusi BUMDes dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Sesuai ketentuan bantuan permodalan untuk BUMDes yang diberikan Kabupaten Cianjur di tahun 2019, pihak Desa dan BUMDes harus melibatkan anggota masyarakat yang tergolong sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM). Rumah Tangga Miskin (RTM) merupakan keluarga yang terdaftar namanya dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) untuk Program Perlindungan Sosial, yang sumber utama Data Terpadu PPFM adalah dari hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu

(PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan untuk menentukan Rumah Tangga Miskin yang akan dilibatkan dalam bisnis usaha BUMDes Karya Mekar. Pada Bulan Februari 2019, Pengurus Utama BUMDes mengadakan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat untuk mencari beberapa RTM yang bisa dilibatkan dalam kegiatan bisnis usaha BUMDes, hingga pada akhirnya ditetapkanlah beberapa pihak terutama para RTM yang merupakan para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau dikenal dengan istilah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemilihan KPM sebagai anggota yang dilibatkan dalam BUMDes mengingat pada umumnya mereka sudah memiliki usaha; para KPM juga sudah terpapar materi mengenai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga, selain itu para KPM juga mendapat pendampingan dari pendamping sosial PKH sehingga akan lebih mudah diorganisir. Melalui hasil asesmen dan musyawarah yang dilakukan pengurus BUMDes, pihak desa maupun pendamping sosial PKH, akhirnya terpilihlah 20 RTM yang sebagian besar merupakan para KPM PKH untuk menjadi bagian dari keanggotaan bisnis usaha dalam BUMDes.

Sesuai amanat yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam pengelolaan BUMDes haruslah didasarkan pada pelibatan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan tersebut direalisasikan di dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan; mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang; menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri (Ridlwani, 2014). Hal demikianlah yang menjadi dasar bagi para pengurus BUMDes Karya Mekar untuk melibatkan masyarakat terutama para KPM PKH yang merupakan Rumah Tangga Miskin mengingat aktivitas usaha yang bisa dijalankan melalui BUMDes dapat meningkatkan kesempatan usaha serta meningkatkan pendapatan mereka.

Unit usaha bisnis dalam BUMDes Karya Mekar terdiri dari Usaha Warung Sembako serta Produk Unggulan Desa Olahan Tahu. Jika diklasifikasikan menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 bahwa keduanya tersebut masuk ke dalam

bisnis yang produksi dan/atau berdagang (*trading*). Bisnis Produk olahan tahu terdiri dari kegiatan pengolahan tahu menjadi beberapa produk makanan seperti *cheese stick* (dibaca sistik) dan kerupuk tahu. Produk ini dijalankan oleh beberapa KPM PKH berjumlah sepuluh orang. Sebelum terlibat dalam bisnis usaha dalam BUMDes, sebelumnya para KPM tersebut membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pihak Pendamping sosial PKH lalu melakukan rekomendasi sehingga kesepuluh KPM PKH yang sebelumnya membentuk KUBE pada akhirnya dilibatkan menjadi anggota unit usaha BUMDes untuk produk unggulan Desa. Seperti yang dikemukakan berikut:

“Pada awalnya KPM ini tergabung dalam kelompok usaha, namun mereka kurang modal dan bingung kalau tidak ada lembaga yang menaungi. Lalu akhirnya saya ajak mereka untuk gabung saja di BUMDES, ya alhamdulillah mereka mau dan tentunya saya tanyakan dulu komitmennya, terlebih pada waktu itu ibu-ibu KPM ini dalam kondisi yang butuh...” (AL, 10 Januari 2020).

Unit usaha bisnis yang selanjutnya adalah Warung Sembako. Bisnis warung sembako ini melibatkan beberapa anggota KPM PKH yang berjumlah sembilan orang. Bisnis warung sembako mampu menyuplai barang-barang kebutuhan pokok khususnya bagi masyarakat, bahkan desa-desa sekitar wilayah Desa Sukajadi seperti dari Desa Cidada maupun Desa Sukadana, banyak warganya yang membeli produk kebutuhan sembako ke warung sembako BUMDes. Pengelolaan unit usaha warung sembako dilakukan oleh salah satu KPM PKH, dan sisanya yang berjumlah delapan orang KPM PKH serta satu orang non KPM PKH menjadi anggota unit. Anggota unit berhak memperoleh akses kemudahan di dalam mengambil barang kebutuhan pokok makanan dengan harga sangat murah; mendapatkan potongan setiap membeli barang; dan mempermudah KPM PKH untuk menghutang terlebih dahulu barang-barang yang akan dijual dengan perjanjian dan syarat tertentu (asas kekeluargaan). Harapan dari bisnis warung sembako ini adalah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan KPM PKH dan tidak mematikan usaha KPM PKH. Diantara KPM PKH yang menjadi anggota unit usaha warung sembako, pada umumnya mereka juga memiliki usaha lainnya seperti warung klontongan, usaha kripik dan usaha gorengan sehingga mereka akan mudah terbantu untuk memperoleh bahan pokok. KPM PKH yang

mengelola unit bisnis warung sembako, mengungkapkan sebagai berikut:

“Misalkan kita membeli barang di sini dengan harga 19 ribu rupiah dari harga beli pada umumnya, kita menjual ke warung-warung KPM PKH atau ke anggota KPM PKH yang ikut unit usaha warung sembako harganya jadi 20 ribu, oleh para anggota unit bumdes ini dijual kembali ke harga standar mencapai 24 ribu, itu adalah harga pasaran di masyarakat, berarti mereka akan mendapatkan keuntungan empat ribu perpenjualan namun keuntungan itu bukan untuk bumdesnya namun untuk para anggota. Intinya kalau disini pokonya laba itu dihasilkan setiap anggota KPM PKH membeli barang dan juga setiap penjualan ke masyarakat umum, namun untuk ke masyarakat umum harganya standar sesuai harga di masyarakat, terkait laba yang dihasilkan setelah membeli dari warung usaha bumdes, itu tergantung KPM PKHnya” (RM, 24 Januari 2020)

Laba keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan warung sembako didapat dari para anggota KPM PKH yang terlibat dalam unit usaha BUMDes maupun dari masyarakat sekitar. Laba tersebut kemudian dipergunakan dengan sistem pembagian 40 persen untuk KPM PKH, 20 persen untuk Kegiatan (Amal, Zakat, transportasi anggota BUMDes) dan 40 persen lainnya untuk Pendapatan BUMDes. Sistem pembagian bagi hasil dalam laba ini tidak hanya dipergunakan untuk unit bisnis warung sembako namun juga untuk unit usaha Produk Unggulan Olahan Tahu yang biasanya memperoleh laba dari hasil penjualan produk. Aktivitas Bisnis Usaha BUMDes Produk Unggulan Olahan tahu dan Warung sembako sudah mulai dijalankan oleh para KPM PKH sejak akhir bulan Agustus 2019.

Modal kekayaan BUMDes Karya Mekar di tahun 2019 berasal dari Penyertaan modal masyarakat desa dan bantuan dana permodalan Pemerintah. Namun terkait dengan implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa, di tahun 2019, dan pengajuan tahun 2020 BUMDes Karya Mekar tidak memperolehnya. Hal demikian bukan menjadi salah satu hambatan bagi BUMDes Karya Mekar untuk berkembang, mengingat semangat kewirausahaan yang dijalankan oleh para KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes Karya Mekar mampu menghasilkan beberapa hal, antara lain: 1) Membuka akses peluang usaha bagi KPM PKH; 2) Meningkatkan Pendapatan Penghasilan Keluarga; 3) Memperoleh akses modal barang dengan mudah;

4) Meningkatkan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan serta; 5) Mempercepat Graduasi Mandiri KPM dari PKH.

1) *Output* BUMDes dalam Membuka Akses Peluang Usaha KPM PKH

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa; meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa; meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa; serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa (Agunggunanto, dkk, 2016). Peluang usaha menjadi salah satu aspek didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal demikian turut dirasakan oleh KPM PKH yang menjadi bagian anggota dari unit usaha BUMDes. KPM tersebut memiliki sumber pendapatan dan memiliki akses untuk berusaha, seperti berdagang, berjualan, maupun membuka usaha warung dan dagang keliling.

Ibu-Ibu KPM yang terlibat dalam unit usaha produk unggulan desa olahan tahu, pada mulanya tergabung dalam kelompok usaha bersama, namun pada waktu itu masih belum berjalan dikarenakan modal dan belum ada pembagian tugas dengan baik. Namun ketika mereka ikut tergabung di dalam BUMDes berkat arahan dari pendamping sosial PKH akhirnya mereka bisa memiliki lebih mengembangkan usahanya dalam BUMDes. Salah satu KPM PKH yaitu Ibu AS mengungkapkan pada awalnya dia hanya ibu rumah tangga biasa yang hanya memperoleh pendapatan dari suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan, sekarang dia mampu menjadi pedagang kerupuk olahan tahu (*cheese stick* dan kerupuk) dengan mendagangkan produk makanan olahan ini ke warung-warung atau melakukan dagang secara berkeliling. Menurut Pengurus BUMDes Karya Mekar Bapak UJ, hal inilah yang menjadi salah satu harapan dimana para Ibu-Ibu KPM PKH ini bisa memiliki akses atau peluang usaha secara mandiri, baik berdagang maupun menjual kembali produk olahan tahu.

Pembentukan BUMDes sebagai sarana pemerintah desa membangun sumber daya manusia yang ada di desa agar lebih aktif dan lebih kreatif. Menciptakan peluang-peluang usaha baru sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi dan juga lapangan kerja baru untuk masyarakat (Kumolo, 2017, h. 201-

203). Peluang kerja baru juga ikut dirasakan tidak hanya oleh Ibu AS namun juga dirasakan oleh kesembilan ibu-ibu KPM PKH lainnya, dimana selain bisa mendagangkan hasil produk mereka juga bisa memproduksi bahan-bahan olahan dari tahu tersebut menjadi kerupuk dan *cheese stick*.

Keuntungan lain juga diperoleh oleh anggota bisnis usaha warung sembako, hasil wawancara peneliti dengan beberapa KPM PKH yang terlibat dalam bisnis usaha BUMDes mengungkapkan bahwa pada mulanya mereka adalah para pedagang warung biasa yang berjualan produk-produk sembako sehari-hari maupun sebagai pedagang keripik, namun mereka juga mampu mengembangkan produk makanan dengan berbagai jenis. Hal demikian dilakukan oleh Ibu EN yang awalnya hanya berjualan mie aci, namun kini lebih bervariasi dimana Ibu EN sekarang berjualan produk makanan jajanan rakyat seperti menjual kue basah, bubur sumsum dan gorengan. Akses peluang usaha dari para KPM PKH telah meningkat, dimana mereka bisa mengembangkan warung klontongannya menjadi lebih bervariasi tidak hanya dua atau tiga jenis produk, namun berbagai kebutuhan rumah tangga bisa mereka suplai.

2) *Output* BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan KPM PKH

Peningkatan pendapatan masyarakat adalah salah satu hal yang ingin dicapai dalam BUMDes. Salah satu manfaat yang diperoleh KPM PKH adalah peningkatan sumber penghasilan atau pendapatan dari bisnis usaha yang dijalankan. Pendapatan yang diperoleh KPM PKH bervariasi, salah satu KPM yang tergabung di dalam usaha produk unggulan desa olahan tahu yaitu Ibu SP mengungkapkan bahwa dulu sebelum tergabung di BUMDes, dirinya belum memiliki penghasilan dan selalu ketergantungan dengan suami, namun kini dirinya memiliki pendapatan yang bisa dipergunakan untuk membantu keluarga dari hasil produksi dan jualan produk olahan tahu, dengan pendapatan bersih mencapai 60 ribu sampai dengan 100 ribu dalam seminggu.

Sumber penghasilan yang meningkat juga menjadikan beberapa KPM PKH mampu memperoleh pendapatan penghasilan yang signifikan. Ibu AN adalah KPM PKH yang tergabung dalam unit usaha warung sembako, selain berdagang beliau juga merupakan produsen makanan keripik singkong dengan

berbagai varian rasa (original dan pedas). Ibu AN mendapatkan keuntungan dari BUMDes, dimana dia memperoleh harga murah untuk membeli bahan baku di warung sembako BUMDes, lalu dia juga bisa mendagangkan hasil produk keripiknya di warung sembako BUMDes. Penghasilan sebelum terlibat dalam BUMDes hanya berkisar 500 ribuan, namun kini bisa mencapai 600 ribu sampai 800 ribu dalam seminggu tergantung pesanan.

Hal serupa juga dirasakan oleh Bapak RM, yang merupakan pengelola unit usaha warung sembako BUMDes, Bapak RM beserta istrinya ibu HN (KPM PKH) diajak bekerja sama untuk mengembangkan unit usaha BUMDes Warung Sembako. Bapak RM merupakan pengelola dan ketua unit usaha Warung Sembako, menurut penuturannya modal awal untuk unit usaha warung sembako dipergunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan barang pokok yang bisa diperjualbelikan, hasil pendapatan dari warung sembako tersebut diputar kembali untuk membeli produk-produk serupa. Bapak RM menuturkan warung usaha sembako bisa menghasilkan perputaran uang berkisar antara 500 ribu sampai dengan satu juta dalam sehari. Sebagai pengelola unit BUMDes, Bapak RM beserta istrinya bisa memperoleh pendapatan yang signifikan dalam sebulan dari kisaran 500 ribu sampai dengan satu juta.

Jika kita kaitkan dengan konsep kewirausahaan secara umum, BUMDes mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan. Melalui wirausaha diharapkan masyarakat dapat belajar mandiri, tidak hanya terpaksa untuk mencari pekerjaan (*job seeker*) namun dapat menciptakan lapangan pekerjaan (*job creator*) bagi dirinya bahkan lingkungan sekitar. Kasmir (2014) menyatakan wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang bermental mandiri dan berjiwa berani mengambil risiko dalam berbagai kesempatan untuk membuka usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Semangat untuk terus berusaha dan berjuang menjadi jalan bagi para KPM untuk berikhtiar dalam meningkatkan sumber pendapatan penghasilan.

3) Output BUMDes dalam Kemudahan Akses Modal Barang

Salah satu *output* atau luaran yang diperoleh KPM dalam meningkatkan perekonomian mereka di dalam BUMDes adalah kemudahan mereka didalam mengakses modal barang.

Banyak diantara KPM yang mengeluhkan keinginannya untuk berwirausaha disebabkan oleh kurangnya modal baik barang maupun uang. Para KPM PKH yang tergabung dalam unit bisnis usaha produk unggulan, tidak hanya bisa bertindak sebagai produsen, namun mereka juga bisa menjadi pedagang atau penjual produk bahkan diantaranya berperan sebagai distributor yang memasarkan produk unggulan olahan tahu berupa *cheesestick* tahu dan kerupuk tahu kepada warung-warung di lingkungan desa maupun di luar desa. Hal demikian memudahkan mereka memperoleh modal usaha dengan terlebih dahulu mengambil produk olahan tahu yang tersedia, tanpa perlu memikirkan modal. Hasil penjualan dari setiap produk KPM mendapatkan keuntungan 1.000 rupiah dari harga jual produk *cheese stick* seharga 5.000 rupiah serta mendapatkan keuntungan sejumlah 2.000 rupiah dari penjualan kerupuk tahu senilai 10.000 rupiah. Dalam sehari produksi olahan tahu bisa mencapai 100 buah untuk *cheese stick* dan 100 sampai dengan 200 buah untuk kerupuk tahu, tergantung dari banyak pesanan orderan.

Manfaat lainnya juga diperoleh KPM PKH yang tergabung dalam unit usaha BUMDes adalah kemudahan di dalam berhutang barang, hal ini diungkapkan oleh KPM PKH bernama ibu AN, dia akan sangat mudah bila mengambil barang terlebih dahulu kepada unit warung sembako, jika belum memiliki modal uang atau kondisi keuangan yang sedang tidak baik. Kemudahan tersebut menjadikan dirinya untuk terus bersemangat dalam berwirausaha mengingat dirinya tidak perlu terbebani, ketua unit usaha BUMDes akan memberikan kelonggaran dalam pelunasan hutang barang didasarkan pada komitmen yang telah disepakati berazas kekeluargaan. Pengelolaan unit Usaha Bumdes yaitu Warung Sembako tidak hanya mengakomodir para KPM PKH yang terlibat dalam unit usaha Bumdes, bahkan ada beberapa warung kecil di masyarakat Desa Sukajadi yang sangat ketergantungan terhadap barang-barang yang disediakan oleh unit usaha warung sembako BUMDes, karena harga barangnya yang murah serta pelayanannya yang mudah. Azas kekeluargaan dan semangat kewirausahaan adalah motto yang dipegang oleh BUMDes Karya Mekar; hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pengurus BUMDes yaitu Bapak AA.

4) *Output* BUMDes dalam Pengetahuan Pengelolaan Keuangan

Pengetahuan tentang pengelolaan keluarga merupakan salah satu fondasi berkembangnya BUMDes. Setiap SDM yang terlibat didalam BUMDES, harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan atau dikenal dengan istilah literasi keuangan. Para KPM PKH yang terlibat dalam BUMDES akan belajar mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan menurut Yushita (2017) merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss management*) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan.

Di dalam BUMDes, KPM PKH yang terlibat mendapatkan proses pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pihak Desa Sukajadi, dilakukan saat pertama kali para KPM PKH ini dilibatkan, menurut Kepala Desa Sukajadi tujuannya adalah agar mereka memahami konsep-konsep kewirausahaan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, karena kedepannya mereka ini akan menjadi wirausahawan baru yang bisa mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa KPM PKH mengungkapkan jika BUMDes ini bisa menjadi cara dari mereka untuk melakukan praktek terkait kegiatan ekonomi mulai dari aktivitas produksi, berjualan bahkan promosi. Pada mulanya KPM PKH merasa malu dan kurang semangat dalam berjualan, namun karena terus mengasah kemampuannya dalam berjualan dan berdagang hingga aktivitas tersebut menjadi suatu hal yang biasa. Melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH Desa Sukajadi serta peningkatan kapasitas pengetahuan melalui diskusi yang selalu rutin diselenggarakan oleh pengurus BUMDes dengan para anggota unit, pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan menjadi suatu kebutuhan bagi para KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes untuk melakukan improvisasi pengetahuan dan keterampilan.

Pengetahuan Pengelolaan Keuangan KPM PKH dapatkan melalui pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau dikenal dalam istilah PKH sebagai P2K2.

Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga yang terdiri dari materi Mengelola keuangan keluarga; Cermat meminjam dan menabung; dan Memulai usaha disampaikan oleh pendamping sosial baik kepada KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes maupun KPM PKH secara umum yang selalu diselenggarakan satu sesi setiap bulan.

Penguatan keterampilan juga dilakukan melalui proses kegiatan usaha dalam BUMDes. KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes selalu saling berinteraksi dan bersilaturahmi, mereka juga menggunakan grup *whatsapp* untuk membagikan aktivitas kegiatan serta media pembelajaran bagi mereka untuk berwirausaha. Penerapan konsep *leadership* dan *learning by doing* juga selalu diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan usaha. Bagi para KPM PKH yang sudah mumpuni dalam literasi keuangan tidak pernah lupa untuk berbagi dan mengajarkan kepada sesama rekannya, hal tersebutlah yang menurut pendamping sosial Bapak AL dan pengurus Bumdes yaitu Bapak UJ menjadi sebuah kekuatan dalam pembangunan sosial dan masyarakat. Konsep pembangunan sosial dan ekonomi yang terealisasi dalam pengetahuan pengelolaan keuangan keluarga sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Midgley (2014). Midgley menyatakan bahwa salah satu strategi pembangunan sosial dalam upaya meningkatkan tarafhidup masyarakat yakni pembangunan melalui komunitas dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama mengembangkan komunitas, tujuan dapat dicapai jikamasyarakat dapat bekerja sama satu sama lain. Pengelola dan penerima manfaat harus saling berinteraksi dengan baik agar usaha yang dilakukan dapat saling menguntungkan juga secara ekonomi.

5) *Output* BUMDes dalam Percepatan Graduasi Mandiri

Menciptakan peluang ekonomi dalam rangka mempercepat graduasi KPM PKH dari kepesertaan program merupakan salah satu tujuan jangka panjang pelibatan KPM PKH di dalam unit usaha BUMDes. Graduasi menjadi hal menarik sekaligus menjadi ciri khas dari bantuan sosial PKH, hal tersebut yang membedakannya dari pola-pola bantuan sosial pemerintah yang lain. Merujuk Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), graduasi ialah berakhirnya masa kepesertaan KPM. PKH, meskipun

program PKH sendiri masih berlangsung, dalam Pasal 56 tertera bahwa graduasi terdiri dari graduasi alamiah dan graduasi sosial ekonomi (graduasi mandiri).

Menurut Khoiriyah (2019) ada lima faktor pendorong graduasi mandiri yaitu pendamping, materi pendampingan, kesempatan usaha, dan kontrol sosial. Dari kelima faktor tersebut, hal yang nampak terjadi pada KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes terutama adalah faktor kesempatan usaha dan proses pendampingan. Kesempatan usaha adalah bukti peluang dari BUMDes yang bisa memberikan jalan bagi para KPM PKH untuk melakukan proses graduasi mandiri. Diantara KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes, tiga diantaranya sudah menyatakan graduasi mandiri yaitu Ibu IM, Ibu NJ, dan Ibu EL. Secara tidak langsung dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga KPM PKH yang graduasi, mereka menyatakan bahwa mereka sudah mengalami peningkatan taraf ekonomi berkat adanya peluang usaha yang mereka dapatkan termasuk salah satunya adalah keterlibatan mereka di dalam BUMDes. Selain ketiga KPM PKH tersebut, salah satu ketua unit usaha warung sembako Bapak RM yang istrinya KPM PKH yaitu Ibu HN juga berencana di Bulan Februari 2020 untuk keluar dari kepesertaan PKH secara sukarela, seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Saya memang sudah niat untuk keluar dari kepesertaan PKH secara sukarela soalnya alhamdulillah sekarang sudah ada usaha menetap, penghasilan saya selama menjadi pengelola unit usaha sembako juga cukup disamping usaha lain yang saya jalani. Saya insya alloh masih mampu membiayai keluarga, Bumdes juga jadi peluang bagi saya untuk maju dan berkembang, maka dari itu insya alloh saya rencana februari sesudah pencairan tahap satu mau keluar dari PKH”. (RM, 25 Januari 2020).

Kesadaran untuk tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial PKH juga menjadi salah satu hal yang mendorong BUMDes untuk terus mengembangkan bisnis usaha, rencana kedepannya BUMDes akan terus berkolaborasi dengan SDM PKH Kabupaten Cianjur, khususnya dengan para KPM PKH di Desa Sukajadi dengan terus menumbuhkan minat kewirausahaan dan tentunya perluasan modal usaha lainnya. Menurut salah satu pengurus BUMDes Bapak UJ dan pendamping sosial PKH Desa Sukajadi Bapak AL, kedepannya

BUMDes Karya Mekar akan melebarkan usahanya pada bisnis keuangan (*financial business*) serta pelebaran produk bisnis dagang lainnya yaitu membuat produksi abon sapi untuk menyuplai kebutuhan pangan di Desa Sukajadi. Hal tersebut masih terkendala mengingat kecukupan modal yang saat ini masih kurang serta alokasi dana desa di tahun 2020 yang belum terencana, namun kendala tersebut masih terus diupayakan diatasi, terutama oleh para pengurus BUMDes dan pendamping sosial PKH untuk terus berkolaborasi di dalam bisnis BUMDes dengan tujuan agar para KPM PKH bisa graduasi secara mandiri dan taraf ekonominya meningkat.

4. KESIMPULAN

Hadir dan berkembangnya BUMDes Karya Mekar secara langsung memberikan kontribusi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sukajadi. Dengan melibatkan KPM PKH dalam unit usaha BUMDes menjadikan para KPM tersebut mandiri dalam segi ekonomi. Peluang dan kesempatan usaha yang diberikan oleh BUMDes kepada KPM PKH menjadi kesempatan bagi para KPM untuk mengembangkan bakat dan minat mereka terhadap dunia kewirausahaan. Target dan tujuan Program Keluarga Harapan untuk mencapai keluarga mandiri dan sejahtera sejalan dengan tujuan dari pelibatan KPM PKH dalam BUMDes. *Output* atau luaran yang dihasilkan dari pelibatan KPM PKH dalam BUMDes adalah: 1) Membuka akses peluang usaha bagi KPM PKH; 2) Meningkatkan Pendapatan Penghasilan Keluarga; 3) Memperoleh akses modal barang dengan mudah; 4) Meningkatkan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan serta; 5) Mempercepat Graduasi Mandiri KPM dari PKH.

Namun, disatu sisi masih terdapat hambatan yang dialami oleh BUMDes Karya Mekar di dalam mengembangkan kewirausahaan KPM PKH, hal tersebut berkaitan dengan modal penyertaan dalam BUMDes yang dirasa masih belum mencukupi sehingga beberapa target pencapaian yang ingin dicapai dalam pengembangan BUMDes masih terkendala. Selain itu, proses pendampingan yang berkelanjutan dari pendamping PKH merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong para KPM PKH yang terlibat dalam BUMDes agar tetap berkomitmen didalam menjalankan usaha dalam bisnis BUMDes.

REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. 2016. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Alifa, Syadza dan Fentiny Nugroho. 2019. "The Role of Local Community Enterprise towards Economic Recovery of Disaster-Affected Community in Indonesia". *Pertanika Journal Social Science & Humaniora*, 27 (4): 2333-2349. Diunduh 28 Januari 2020, dari [http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2027%20\(4\)%20Dec.%202019/10%20JSSH\(S\)-1091-2019.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2027%20(4)%20Dec.%202019/10%20JSSH(S)-1091-2019.pdf).
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2017. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta". *Jurnal Atma Jaya*, 28 (2): 155-167.
- Ansari, B., et al. 2013. "Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas". *Research Journal of Environmental and Earth Science*, 5 (1): 26-31.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Infrastruktur Indonesia 2019: Hasil Pemutakhiran Perkembangan Desa 2019*. Jakarta: CV Nario Sari.
- Bungin, H.M.B. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Caya, Muhammad Fajar Nandra dan Etty Rahayu. 2019. "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung". *Jurnal Fisip Universitas Indonesia*, 20(1): 1-12.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. California: SAGE Publications, Inc.
- Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoiriyah, N. 2019. Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Pati. *Jurnal UIN Mataram, Komunitas*, 10(2): 143-156.
- Kumolo T. 2017. *Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2018. *Data Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- Khosyi, Y. A., Nurrohman, A., & Fahmi, R. A. 2018. Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise di BUMDes Nglanggeran 5(1).
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. 2019. "Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)". *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2): 127-137.
- Masunzu, D. S. (2014). *Conditional cash transfers (CCTs) and Poverty Alleviation: A comparative study between Jamaica and Tanzania* (Master's thesis, Oslo and Akershus University College).
- Midgley, James. 2014. *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publications Ltd.
- Neuman, W. Lawrence. 2016. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Edition. University of Wisconsin, Whitewater: Pearson Education, Inc.
- Pathak, V., Jena, B., & Kalra, S. 2013. "Qualitative Research". *Perspectives in Clinical Research*, 4(3): 192.
- Prasetyo, R. A. 2016. "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86-100.

Ridlwani, Zulkarnain. (2014). “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3): 424-440.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

Tama, D. O. E., & Yanuardi, M. S. 2013. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul”. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1-28.

Yushita, Amanita Novi. 2017. “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi”. *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1): 11-26.

Zastrow, Charles. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. 10th Edition. Belmont : Brooks/Cole.

- 1) **Mochammad Ikbal Sonuari**, Mahasiswa Program Magister Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia
- 2) **Fentiny Nugroho**, Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia, *Corresponding Author*. Email: fentiny2015@gmail.com